

Problema dan strategi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia

Sebelas maret University Press - STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI



Description: -

-Problema dan strategi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia

-Problema dan strategi pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia

Notes: Includes bibliographical references (p. 81-83).

This edition was published in 2007



Filesize: 53.83 MB

Tags: #Korupsi, #Kolusi #& #Nepotisme #di #Indonesia

Dampak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Suharto memanfaatkan sistem patronase untuk mendapatkan loyalitas bawahannya, anggota elit nasional dan kritikus terkemuka. Menurunnya tingkat kesejahteraan menyengsarakan rakyat, kerusakan lingkungan sumber daya alam, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, hilangnya modal manusia yang handal, rusaknya moral masyarakat secara besar-besaran bahkan menjadikan bangsa pengemis merupakan cerminan dari dampak KKN. .

Bagaimanakah Dampak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Persoalan Birokrasi?

Semoga makalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme KKN ini dapat bermanfaat bagi kami dan segenap tumpah darah Indonesia untuk memajukan negara ini menuju Indonesia tercinta bebas KKN. Sebagai seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, presiden seharusnya mampu menjadi suri tauladan bagi mereka yang dipimpinnya. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.

Pelanggaran terhadap polstranas di bidang hukum

Dala keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala Negara, tingkat penentuan kebijakan puncak ini mencakup kewenangan presiden sebagai kepala Negara, yaitu dekrit, peraturan, atau piagam kepala Negara.

Korupsi, dari Kerajaan Nusantara hingga Reformasi

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Keselamatan para pekerja dipertaruhkan ketika berbagai bahan infrastruktur tidak memenuhi standar keselamatan karena minimnya dana. Selain itu juga diberikan rekomendasi kepada pihak kementerian dan lembaga terkait sebelum melakukan langkah — langkah perbaikan.

Korupsi, Kolusi & Nepotisme di Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Related Books

- [Organizatsii v sovremennoi ekonomike](#)
- [Thomas Müntzer - Auswahlbibliographie : zum Wirken Thomas Müntzers im Gebiet der heutigen Bezirke](#)
- [AIDS in the industrialized democracies - passions, politics, and policies](#)
- [Zastupiteľská sústava Československej socialistickej republiky](#)
- [Caretakers, the forgotten people](#)